



KEMENTERIAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 10270
Kotak Pos 6505 Telepon : (021) 5730191, Fax : (021) 5738732

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2025
TENTANG
DAFTAR RINCIAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIKAN DAN
DIUMUMKAN SECARA BERKALA, DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA
DAN TERSEDIA SETIAP SAAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekretaris jenderal kementerian kehutanan menetapkan Daftar Rincian Informasi Publik yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Diumumkan secara Serta Merta, dan Tersedia Setiap Saat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Daftar Rincian Informasi Publik yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Diumumkan secara Serta Merta, dan Tersedia Setiap Saat di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG DAFTAR RINCIAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA, DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA, DAN TERSEDIA SETIAP SAAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.
- KESATU : Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID, menetapkan daftar informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, diumumkan secara serta merta dan tersedia setiap saat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal.
- KEDUA : Daftar Informasi sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU merupakan acuan bagi setiap satuan kerja di Kementerian Kehutanan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Nomor 71 Tahun 2024 tentang Daftar Informasi Publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang menyangkut tugas dan fungsi bidang kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Dr. Ir. Mahfudz, MP
NIP. 19670829 199203 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan;
2. Wakil Menteri Kehutanan;
3. Anggota Pembina PPID/Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Kehutanan;
4. PPID Kementerian Kehutanan;
5. Anggota PPID Pelaksana Kementerian Kehutanan;
6. Anggota PPID UPT Kementerian Kehutanan;
7. Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Kehutanan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BIRO HUKUM,



Herti Wastuti Reinisia
NIP. 19810314 200501 2 025

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
 NOMOR 70 TAHUN 2025
 TENTANG
 DAFTAR RINCIAN INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA,
 DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA, DAN TERSEDIA SETIAP SAAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

No	Informasi Publik		Satuan Kerja yang Menguasai Informasi	Kategori			Keterangan (Dokumen Pendukung/ Website)
				Berkala	Serta merta	Setiap saat	
I	INFORMASI UMUM						
1		Perumusan/Pedoman/Standar/NSPK/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis kebijakan dari kegiatan Kehutanan	Satuan Kerja Lingkup Kemenhut			V	
2		Peraturan Perundang-Undangan	Informasi Umum			V	
3		Kerjasama Antar Lembaga	Informasi Umum	V			
4		Pemberitaan dan Publikasi	Informasi Umum	V			
5		Program dan anggaran	Informasi Umum			V	
6		Rencana Strategis	Informasi Umum			V	
7		Rencana Kerja Tahunan	Informasi Umum			V	
8		Rencana Kinerja Tahunan	Informasi Umum			V	
9		Perjanjian Kinerja Tahunan	Informasi Umum			V	
10		Rakor Tingkat Nasional	Informasi Umum			V	
II	INSPEKTORAT JENDERAL (PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN)						
1		Rencana Pengawasan	Inspektorat Jenderal			V	

	a.	Rencana Strategis Pengawasan	Informasi Umum				
	b.	Rencana Kerja Tahunan Pengawasan	Informasi Umum				
	c.	Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan	Informasi Umum				
	d.	Perjanjian Kinerja Tahunan Pengawasan	Informasi Umum				
	e.	Rakor Pengawasan Tingkat Nasional	Informasi Umum				
2		Pedoman Kebijakan Pengawasan	Inspektorat Jenderal			V	
3		Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan	Inspektorat Jenderal	V			
III DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN							
1	DIREKTORAT RENCANA, PERUBAHAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN		Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan				
	1	Buku Rencana Kehutanan Tingkat Nasional beserta Peta	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			Lampiran peta format SHP dikecualikan
	2	Jumlah Provinsi Penyusunan/Revisi/Review Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			
	3	Luas Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Proses Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah	V			

			Pengelolaan Hutan				
4		SK Perubahan Kawasan Hutan dan Peta Lampiran	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			V	Lampiran peta format SHP dikecualikan
5		Luas Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			Buku Statistik Bidang PKTL
6		Luas Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) model per Provinsi	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			Buku Statistik Bidang PKTL
7		Luas Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) per Provinsi	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			Buku Statistik Bidang PKTL

8	SK Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) beserta lampiran	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			V	
9	SK Penetapan KPH Model dan peta lampiran	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			V	
10	SK Penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) beserta lampiran	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			Peta format shapefile dikecualikan
11	Luas Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			Buku statistik bidang PKTL
12	Luas Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			

	13	Luas Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan dan Pertanian	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	V			
	14	SK Pelepasan Kawasan Hutan	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			V	Lampiran Peta format SHP dikecualikan
	15	SK Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Parsial	Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan			V	
2	DIREKTORAT PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN						
	1	SK Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			
	2	Peta Lampiran SK Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			
	3	Jumlah Unit dan Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Survey/Ekplorasi Tambang	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			
	4	Jumlah Unit dan Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Survey/Ekplorasi Non Tambang	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			

	5	Jumlah Unit dan Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Tambang	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			
	6	Jumlah Unit dan Luas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Operasi Produksi Non Tambang	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			
	7	Jumlah Unit dan Luas Lahan Kompensasi	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			
	8	Nilai Rupiah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)	Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan	V			
3	DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN		Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan				
	1	Kerapatan Tegakan, Luas Bidang Dasar, Volume Tegakan, Biomassa, dan Karbon pada Tutupan Lahan per Provinsi	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	V			data proses dikecualikan
	2	Neraca Sumber Daya Hutan/NSDH	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	V			
	3	Data Spasial Penutupan Lahan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	V		V	Data proses dan data shapefile dikecualikan

	4		Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	V			
	5		Rekalkulasi Luas Penutupan Lahan Indonesia per Provinsi	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	V			
	6		Rekalkulasi Luas Penutupan Lahan Indonesia per Pulau	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	V			
	7		Angka Deforestasi Netto di Dalam dan Luar Kawasan Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	V			
4	DIREKTORAT PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN			Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan				
	1		Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	V			
	2		Panjang Penataan Batas Kawasan Hutan	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	V			
	3		Luas dan Jumlah Unit Penetapan Kawasan Hutan Per Provinsi	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	V			

	4	Luas Penetapan Kawasan Hutan berdasarkan Kelompok Hutan per Provinsi	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	V			
	5	Luas Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan	V			
	6	SK Peta Kawasan Hutan Provinsi	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan			V	Lampiran Peta format SHP dikecualikan
	7	SK penetapan Kawasan Hutan	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan			V	
	8	SK penunjukan Kawasan Hutan	Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan			V	
IV	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM						
	1	PERENCANAAN KONSERVASI	Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem				
	1	Luas kawasan konservasi	Direktorat Perencanaan Konservasi	V			
	2	Penataan zonasi	Direktorat Perencanaan Konservasi	V			
	3	Kerjasama penyelenggaraan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam	Direktorat Perencanaan Konservasi			V	
	4	Rencana pengelolaan jangka panjang yang di sahkan	Direktorat Perencanaan Konservasi			V	

2	DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN		Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Alam Ekosistem Daya dan				
	1	Kawasan konservasi yang mendapatkan penetapan internasional	Direktorat Konservasi Kawasan	V		V	
	2	Desa di kawasan konservasi	Direktorat Konservasi Kawasan			V	
	3	Indeks efektivitas pengelolaan kawasan konservasi	Direktorat Konservasi Kawasan	V			
	4	Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi	Direktorat Konservasi Kawasan	V			
3	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK		Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Alam Ekosistem Daya dan				
	1	Rekapitulasi PNBK pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	V			
	2	Rekapitulasi devisa dari perdagangan tumbuhan dan satwa liar keluar negeri	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	V			
	3	Jumlah unit penangkar tumbuhan dan satwa liar	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	V			

	4	Jumlah pemegang izin usaha pengedar tumbuhan dan satwa liar	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	V			
	5	Lembaga konservasi	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	V			
	6	Rekapitulasi pelepasliaran satwa	Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	V			
4	DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN		Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem				
	1	Perizinan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan	V			
	2	Potensi jasa lingkungan karbon kawasan konservasi	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan	V			
	3	Pengunjung kawasan konservasi	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan	V			
	4	Penerimaan PNBK dari pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan	V			
	5	Penyerapan tenaga kerja dari kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi	Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan	V			

5	DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM DAN BINA AREAL PRESERVASI		Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Alam Ekosistem	Daya dan				
	1	Luas pemulihan ekosistem kawasan konservasi	Direktorat Pemulihan Ekosistem Bina Preservasi	dan Areal	V			
	2	Rencana dan realisasi pemulihan ekosistem kawasan konservasi	Direktorat Pemulihan Ekosistem Bina Preservasi	dan Areal	V		V	
V	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN							
1	DIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI							
	1	Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai						
	a.	Supervisi/bimbingan teknis internalisasi/implementasi Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST)	Direktorat PEPDAS				V	
	b.	Penyiapan MoU Pengelolaan DAS Lintas Negara	Direktorat PEPDAS				V	
	c.	Kompilasi peta klasifikasi DAS dan potensi banjir dan tanah longsor	Direktorat PEPDAS		V			
	d.	Supervisi bimbingan teknis penyusunan baseline data karakteristik DAS	Direktorat PEPDAS				V	
	e.	Konsolidasi penyusunan MoU DAS lintas negara dan internalisasi RPDAST ke dalam RTRW	Direktorat PEPDAS				V	
	f.	Revitalisasi forum DAS nasional	Direktorat PEPDAS		V			

	g.	Bimbingan teknis/Supervisi kebijakan Pengelolaan DAS	Direktorat PEPDAS			V	
2	Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai						
	a.	Monitoring dan evaluasi banjir dan tanah longsor	Direktorat PEPDAS			V	
	b.	Monitoring dan evaluasi tata air (SPAS)	Direktorat PEPDAS			V	
	c.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS	Direktorat PEPDAS	V			
	d.	Monitoring dan evaluasi Impact Assesment RHL/Monev Sedimen lokasi RHL	Direktorat PEPDAS	V			
2	DIREKTORAT TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN REKLAMASI HUTAN						
	1	Bangunan Konservasi Tanah dan Air					
	a.	Progres Kegiatan Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air (Dam Penahan dan Gully Plug)	Direktorat TKTRH	V			
	2	Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan					
	a.	Progres Serah Terima Penanaman Hasil Rehabilitasi DAS	Direktorat TKTRH	V			
	b.	Progres Reklamasi Hutan	Direktorat TKTRH	V			
3	DIREKTORAT PENGHIJAUAN DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN						
	1	Penghijauan					
	a.	Laporan tahunan penanaman pohon seluruh Indonesia	Direktorat PPTH	V			
	b.	Laporan tahunan hutan rakyat/agroforestry	Direktorat PPTH	V			dari KBR, dinas,
	c.	Laporan tahunan hutan kota	Direktorat PPTH	V			
	d.	Laporan tahunan penghijauan lingkungan	Direktorat PPTH	V			
	e.	Pembuatan Kebun Bibit Rakyat	Direktorat PPTH	V			
	2	Pengembangan Usaha Perbenihan					
	a.	Fasilitasi usaha perbenihan	Direktorat PPTH	V			temu usaha tergantung DIPA
	b.	Pengembangan jejaring kerja dan informasi usaha perbenihan tanaman hutan	Direktorat PPTH			V	

3	Pengendalian Peredaran Benih					
	a.	Sertifikasi mutu benih dan bibit	Direktorat PPTH	V		
	b.	Penetapan pengada pengedar terdaftar	Direktorat PPTH	V		
	c.	Perijinan Bidang Perbenihan Tanaman Hutan	Direktorat PPTH	V		
	d.	Penyediaan Bibit Berkualitas	Direktorat PPTH		V	
4	Pengembangan Sumber Daya Benih dan Sumber Daya Genetik					
	a.	Pengelolaan Sumber Benih Berserifikat	Direktorat PPTH		V	
	b.	Sertifikasi sumber benih	Direktorat PPTH	V		
	c.	Potensi produksi benih dari sumber benih bersertifikat	Direktorat PPTH	V		
	d.	Peta Zonasi Benih	Direktorat PPTH		V	
	e.	Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Benih Unggul	Direktorat PPTH		V	
4	DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN					
	1	Reboisasi (2022-2024)				
	a.	Data hasil kegiatan penanaman RH	Direktorat RH		V	
	b.	Kegiatan FOLU	Direktorat RH		V	
	c.	Kegiatan Forest Programme (FPiV)	Direktorat RH		V	
	2	Penguatan Kelembagaan RH				
	a.	Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA)	Direktorat RH	V		
	b.	Penguatan Kelembagaan RH	Direktorat RH	V		
	3	Penghijauan (2022-2024)				
	a.	Data penanaman serentak	Direktorat RH		V	
	b.	Kebun Bibit Rakyat (KBR)	Direktorat RH		V	
	c.	Usaha Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA)	Direktorat RH		V	
5	DIREKTORAT REHABILITASI MANGROVE					
	1	Rehabilitasi Hutan Mangrove				
	a.	Data Hasil Kegiatan Rehabilitasi Mangrove	Direktorat RM	V		

	b.	Data Rehabilitasi Mangrove FOLU	Direktorat RM	V			
	c.	Data Rehabilitasi Mangrove M4CR	Direktorat RM	V			
2	Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove						
	a.	Pengelolaan Program FPVI	Direktorat RM	V			
VI	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI						
1	DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN						
1		Data Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan (PBPHH)	Direktorat Pengolahan Pemasaran Hutan	Bina dan Hasil	V		Daftar pemegang IUIPHHK, Rekapitulasi IUPHHK serta Rekapitulasi Perkemangan Izin Perluasan Pertahun.
2		Pemenuhan bahan baku PBPHH skala besar	Direktorat Pengolahan Pemasaran Hutan	Bina dan Hasil	V		Rencana dan realisasi pemenuhan bahan baku industri
3		Produksi pengolahan hasil hutan PBPHH skala besar	Direktorat Pengolahan Pemasaran Hutan	Bina dan Hasil	V		Rekapitulasi produksi kayu lapis, veneer, kayu gergajian, serpih kayu dan pulp per propinsi
4		Sertifikasi legalitas kelestarian	Direktorat Pengolahan Pemasaran Hutan	Bina dan Hasil	V		Daftar pemegang SLK pada IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, TDP, IRT/ Pengrajin dan Pemilik Hutan Hak.

	5		Ekspor produk industri kehutanan	Direktorat Pengolahan Pemasaran Hutan	Bina dan Hasil			V	Daftar Ekspor produk kayu olahan, Importir produk kayu ulat dan kayu olahan, eras dan nilai ekspor produk kayu olahan, berat/volume impor produk kayu bulat dan kayu olahan.
2	DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN								
	1		Bagian A Dokumen Rencana Kerja Umum Pemanfaatan Hutan (RKUPH)	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan				V	Produksi kayu bulat HA (berbasis RKT) penanaman HA, multi system silvikultur (MSS) dan Silin. RKU kecuali bab III, IV, Silvikultur dan analisa finansial
	2		Bagian A dan B Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH)	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan				V	Produksi kayu bulat HTI (berbasis RKT) penanaman HTI, multi system silvikultur (MSS) dan Silin. RKU kecuali bab III,IV, Silvikultur

								dan analisa finansial
	3		Hasil Penilaian kinerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	V			
	4		Realisasi Penanaman Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan	V			
3	DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN							
	1		Peta arahan pemanfaatan hutan untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	V			
	2		Data Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang sudah disahkan	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	V			
	3		Data Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan	V			
4	DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN							
	1		Data Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (berupa data provinsi, nama unit manajemen, nomor tanggal SK, luas izin)	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	V			
5	DIREKTORAT IURAN DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN							
	1		Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan	Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	V			
	2		Data Peredaran Hasil Hutan	Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			V	
	3		Rekapitulasi Jumlah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan			V	

VII DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL						
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial					
1	Data Luas Hutan yang dikelola masyarakat dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) menjadi 12,7 juta hektar	Bagian PEHKT Setdijen PS	V			
2	SK Persetujuan Perhutanan Sosial	Bagian PEHKT Setdijen PS	V			
3	Nilai Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Bagian PEHKT Setdijen PS	V			
4	Data Capaian Perhutanan Sosial	Bagian PEHKT Setdijen PS	V			
2	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA)					
1	SK Penetapan Hutan Adat telah diserahkan Presiden	Direktorat PKTHA	V			
2	Rencana Lokus Verifikasi Usulan Hutan Adat Tahun Berjalan	Direktorat PKTHA	V			
3	Data Hutan Adat diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan	Direktorat PKTHA	V			
4	SK Tim Terpadu Verifikasi Usulan Hutan Adat per Lokus	Direktorat PKTHA			V	
5	Data Capaian Penetapan Hutan Adat	Direktorat PKTHA	V			
6	Peta Indikatif Potensi Konflik Tenurial Kawasan Hutan	Direktorat PKTHA	V			
3	Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial (PUPS)					
1	Dokumen Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS)	Dit.PUPS dan Balai PS			V	
2	Data kelompok usaha perhutanan sosial	Direktorat PUPS	V			
3	Data Alat ekonomi produktif Perhutanan Sosial	Direktorat PUPS	V			

	4	Kelas KUPS (Blue, Silver, Gold, Platinum)	Dit.PUPS dan Balai PS	V			
	5	Peningkatan Nilai Tambah Produk Pengembangan Sosial Nusantara (Bang Pesona) dan Alat Ekonomi Produktif (AEP)	Dit.PUPS dan Balai PS			V	
	6	Dokumen Rencana Aksi Integrated Area Development (IAD) Berbasis Perhutanan Sosial	Dit.PUPS dan Balai PS			V	
4	Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial (PPS)						
	1	Rekapitulasi Data Pendamping Berdasarkan Provinsi/Kabupaten, Status (ASN/Non ASN), Jenis Kelamin, dan Balai PS	Subdit Pelembagaan PS Dit. PPS	V			
5	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS)						
	1	Data Capaian Luas Akses Kelola Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan	Direktorat PKPS	V			
	2	SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan (Nama KPS, Nomor SK, Tanggal SK)	Direktorat PKPS			V	
	3	SK Perubahan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang sudah ditetapkan (Nama KPS, Nomor SK, Tanggal SK)	Direktorat PKPS			V	
VIII	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN						
	1	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KEHUTANAN	Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan				
	1	Rekapitulasi Jumlah Penanganan Pengaduan	Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan	V			
	2	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEPERDATAAN KEHUTANAN	Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan				

	1	Rekapitulasi Jumlah Pengawasan Penaatan	Direktorat Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan	V			
	2	Rekapitulasi Jumlah Keputusan mengenai penerapan sanksi	Direktorat Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan	V			
3	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN KEPERDATAAN KEHUTANAN		Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan				
	1	Rekapitulasi Jumlah Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Kehutanan	Direktorat Pengawasan Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan	V			
4	DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN		Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Kehutanan				
	1	Titik panas/hot spot	Direktorat PKH	V	V		
	2	Luas Kebakaran Hutan	Direktorat PKH	V	V		
	3	Peta Rawan Kebakaran Hutan	Direktorat PKH			V	
	4	Peringkat Bahaya Kebakaran Hutan	Direktorat PKH	V	V		
5	DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA DAN PENANGANAN HUTAN						

	1	Data Jumlah Polisi Kehutanan, PPNS dan Manggala Agni	Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Penanganan Hutan			V	
6	DIREKTORAT PENINDAKAN PIDANA KEHUTANAN						
	1	Rekapitulasi Jumlah Penegakan Hukum Pidana Kehutanan	Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan			V	
	2	Ringkasan Informasi Hasil Operasi Penegakan Hukum Pidana Kehutanan	Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan			V	
IX	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
	1	Pusat Penyuluhan					
	1	Program Kerja Penyuluhan	Pusat Penyuluhan			V	
	2	Materi Penyuluhan	Pusat Penyuluhan			V	
	3	Programa Penyuluhan	Pusat Penyuluhan	v			
	4	Data Sarana Penyuluhan	Pusat Penyuluhan			V	
	5	Rekapitulasi Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluhan	Pusat Penyuluhan			V	
	6	Evaluasi dan Laporan Penyuluhan	Pusat Penyuluhan			V	
	7	Rekapitulasi data & profil Kelompok Tani Hutan	Pusat Penyuluhan			V	
	8	Rekapitulasi Data Penyuluh PNS, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) & Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS)	Pusat Penyuluhan			V	
	9	Rekapitulasi Data & profil Wanawiyata Widyakarya	Pusat Penyuluhan	V			
	10	Hasil-hasil penyuluhan	Pusat Penyuluhan			V	
	11	Hasil lomba wanalestari	Pusat Penyuluhan	V			
	12	Profil Pusat Penyuluhan	Pusat Penyuluhan			V	
3	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				

	1	Peraturan-peraturan	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		V		
	2	Proses uji kompetensi jabatan fungsional tertentu binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		V		
	3	Pengembangan standar kompetensi	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		V		
	4	Laporan keuangan	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V			
	5	Program dan anggaran	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	V			
	6	Hasil audit	Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				
4	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan						
	1	Rangkuman Kurikulum dan Silabus	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan			V	
	2	Modul	Pusdiklat SDM			V	
	3	Jadwal pendidikan dan pelatihan	Pusdiklat SDM	V			
	4	Profil Widyaiswara	Pusdiklat SDM	v			
	5	Prosedur standar operasi (SOP) ISO	Pusdiklat SDM			V	

	6	Aplikasi e-learning	Pusdiklat SDM	V			
	7	Profil Balai P2SDM Wilayah & SMKKN	Pusdiklat SDM	V			
	8	Profil Pusdiklat SDM KEHUTANAN	Pusdiklat SDM	V			
	9	Evaluasi Pasca Diklat	Pusdiklat SDM			V	
	10	Rekapitulasi Alumni Diklat	Pusdiklat SDM	V			
5	Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan						
	1	Kegiatan Kewirausahaan Kreatif Kehutanan yang Terbentuk	Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan	V			
	2	Jumlah Partisipasi Generasi Muda yang mendukung penelusuran data defisien jenis keanekaragaman hayati	Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan	V			
	3	Panduan Kegiatan Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan	Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan			V	
	4	Profil PUSGENRI	Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan	V			
X	PUSAT DATA DAN INFORMASI						
	1	Dokumen Statistik Kehutanan	Bagian Pengelolaan Data dan Informasi	V			
	2	Laporan Informasi Ekspor Impor Komoditi Kehutanan	Bagian Pengelolaan Data dan Informasi	V			
	3	Dataset Kementerian Kehutanan	Bagian Pengelolaan Data dan Informasi	V			

	4	Hasil Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Bagian Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi			V	
	5	Laporan Jumlah Kunjungan Museum dan Perpustakaan Kehutanan	Bagian Pengelolaan Data dan Informasi	V			
XI	PUSAT KEBIJAKAN STRATEGIS						
1	BIDANG FASILITASI KEBIJAKAN STRATEGIS		Pusat Kebijakan Strategis				
	1	Nilai Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kehutanan	Pusat Kebijakan Strategis	V			
XII	PUSAT PENGEMBANGAN HUTAN BERKELANJUTAN						
	1	Data Koleksi Xylarium	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan			V	
	2	Data Koleksi Herbarium	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan			V	
	3	Data Koleksi Mikroba Hutan	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan			V	
	4	Data Koleksi Sutra	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan			V	-
	5	Informasi Pelayanan Laboratorium Kehutanan (Terakreditasi ISO/IEC 17025:2017)	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan			V	

	6	Data Pengelolaan KHDTK Lingkup P2HB	Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan	V			
XIII	PUSBANG MITIGASI DAN ADAPTASI BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEHUTANAN						
	1	<u>Pemberitaan dan Publikasi Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi</u>	Pusbang Mitigasi			V	
	2	Dokumen Kerja sama Pusbang Mitigasi	Pusbang Mitigasi	V			
	3	Laporan Model Mitigasi dan Adaptasi	Pusbang Mitigasi	V			
	4	Laporan analisis Bencana Hidrometeorologi Kehutanan	Pusbang Mitigasi	V			
	5	<u>Informasi bencana Hidrometeorologi Kehutanan</u>	Pusbang Mitigasi	V			
	6	Informasi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Lingkup Pusbang Mitigasi	Pusbang Mitigasi	V			
XIV	BIRO PERENCANAAN						
	1	Rencana Strategis Kementerian Kehutanan	Rencana Program dan Anggaran	V			-
	2	<u>Rencana Kerja Kementerian Kehutanan</u>	Rencana Program dan Anggaran	V			-
	3	<u>DIPA Eselon I Kementerian Kehutanan</u>	Rencana Program dan Anggaran			V	-
	4	<u>Laporan Kinerja Kementerian Kehutanan/Unit Kerja</u>	Pengelolaan Kinerja	V			-
	5	<u>Kerja sama Dalam Negeri (MoU)</u>	Pengelolaan Kinerja	V			-
	6	<u>Pengarusutamaan Gender (PUG)</u>	Tata Usaha	V			
XV	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI (SDMO)						
	1	Data Formasi Pegawai					
	a.	Penetapan Formasi	Biro SDMO			V	
	b.	Penetapan Formasi Khusus	Biro SDMO			V	
	2	Pengadaan Pegawai	Tim Kerja P3				
	a.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
	1	Proses Penerimaan Pegawai, meliputi :	Biro SDMO				

	-	Pengumuman			V		
	-	Seleksi administrasi			V		
	-	Pemanggilan peserta tes			V		
	-	Pelaksanaan CAT			V		
	-	Keputusan hasil ujian			V		
	-	Keputusan hasil uji kompetensi bidang			V		
	-	Wawancara			V		
	2	Penetapan Pengumuman Kelulusan	Biro SDMO		V		
	3	Surat Keputusan CPNS/PNS Kolektif	Biro SDMO		V		
	b.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	Biro SDMO		V		
3		Pembinaan Karier Pegawai	Tim Kerja MKKP				
	a.	Ujian Dinas					
		1 Pengumuman Pelaksanaan Ujian Dinas		V			
4		Mutasi Pegawai					
	a.	Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Unit Kerja	Tim Kerja MKKP		V		Pengumuman Pelaksanaan Seleksi Pindah Instansi
	b.	Pembukaan Periode Usul Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan	Tim Kerja MKKP			V	
	c.	Regulasi Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Fungsional	Tim Kerja JF			V	
5		Administrasi Pegawai	Biro SDMO				
	a.	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Tim Kerja JPTAPD		V		
	b.	Pelaksana Tugas	Tim Kerja JPTAPD		V		
	c.	Pelaksana Harian	Tim Kerja JPTAPD		V		
	d.	Pengaturan Cuti ASN	Tim Kerja MKKP		V		
	e.	Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)	Tim Kerja DASI		V		
6		Kesejahteraan Pegawai					
	a.	Regulasi tunjangan kinerja	TU			V	

7	Penghargaan dan Tanda Jasa		Tim Kerja MKKP				
	a	Penghargaan Kementerian Kehutanan				V	
	b	Penghargaan Nasional				V	
	c	Penghargaan Internasional				V	
8	Organisasi dan Tata Laksana						
	a	Struktur organisasi pada: Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, UPT (Balai Besar/Balai/SMKKN), instansi yang menangani bidang kehutanan di daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan, BUMN, dan Asosiasi Kehutanan yang berkenaan dengan Pembentukan, Perubahan, Pembubaran	Tim Kerja TALA			V	
	b	Perumusan Jabatan yang terdiri dari analisa jabatan, uraian jabatan, klasifikasi jabatan, dan evaluasi jabatan				V	
	c	Sistem karier	Tim Kerja JPTAPD			V	
	d	Tata Laksana mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia, koordinasi, laporan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Tim Kerja TALA			V	
	e	Evaluasi kelembagaan	Tim Kerja NATOR	V			
XVI	BIRO KEUANGAN						
A	RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (RAPBN)		Biro Keuangan				
	1	Penyusunan RAPBN		V			
		Arah Kebijakan Umum, Strategi, Program, Prioritas, dan Renstra					
		Rencana Strategis (Renstra) Unit Kerja	Biro Keuangan				
B	PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)						
	1	Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara	Biro Keuangan			V	
	2	Pembahasan RAPBN dengan Komisi DPR-RI	Biro Keuangan			V	

3	Risalah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI	Biro Keuangan			V	
4	Penetapan Pagu Definitif	Biro Keuangan			V	
5	Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Lembaga (RKA-K/L)	Biro Keuangan			V	
6	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisinya, Rencana Kegiatan Pelaksanaan (RKP)	Biro Keuangan	V			
7	Target Penerimaan Negara Bukan Pajak	Biro Keuangan			V	
C	PELAKSANAAN ANGGARAN	Biro Keuangan				
1	Dokumen Realisasi Pendapatan					
	a. Hibah	Biro Keuangan			V	
	b. Piutang Negara	Biro Keuangan			V	
2	Belanja					
	a. Dokumen Belanja Barang/Jasa termasuk Dokumen-Dokumen Pembayarannya:	Biro Keuangan				
	1 Belanja Barang Operasional	Biro Keuangan			V	
	2 Belanja Barang Non Operasional	Biro Keuangan			V	
	3 Belanja Jasa	Biro Keuangan			V	
	4 Belanja Pemeliharaan gedung dan bangunan/Peralatan dan mesin	Biro Keuangan			V	
	5 Belanja perjalanan dinas	Biro Keuangan			V	
	7 Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda	Biro Keuangan			V	
	b. Dokumen Belanja Modal				V	
	1 Tanah dan Bangunan	Biro Keuangan				
	2 Barang Bergerak/Barang Inventaris	Biro Keuangan				
	c. Penggunaan dana Pemerintah RI untuk kontribusi/iuran pada Badan atau Organisasi Internasional	Biro Keuangan			V	
	d. Hutang Negara	Biro Keuangan			V	
	e. Dokumen Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Pembangunan HTI	Biro Keuangan			V	

	f.	Dokumen pinjaman dalam rangka Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Desa(HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Usaha Pemanfaatan Hutan Alam dengan Teknik Pengayaan Silvikultur Intensif (SILIN), Usaha Restorasi Ekosistem (REKI)	Biro Keuangan			V	
	g.	Dokumen Kredit Usaha, antara lain : Kredit Usaha Hutan Tanaman Rakyat (KUHTR), Kredit Usaha Kecil Daerah Aliran Sungai (KUKDAS), Kredit Usaha Persuteraan Alam (KUPA)	Biro Keuangan			V	
	h.	Laporan Keuangan Tahunan, terdiri dari :	Biro Keuangan			V	
		1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Biro Keuangan				
		2 Neraca	Biro Keuangan				
		3 Laporan Arus Kas	Biro Keuangan				
		4 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biro Keuangan				
3		Laporan Realisasi Bulanan SAI/Semesteran/Tahunan	Biro Keuangan	V			
	a.	Laporan Semesteran	Biro Keuangan	V			
		1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Biro Keuangan				
		2 Laporan Arus Kas	Biro Keuangan				
		3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biro Keuangan				
		4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM)	Biro Keuangan				
	b.	Laporan Tahunan	Biro Keuangan	V			
		1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Biro Keuangan				
		2 Laporan Arus Kas	Biro Keuangan				
		3 Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)	Biro Keuangan				
		4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)	Biro Keuangan				
		5 Opini	Biro Keuangan				
D		PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA	Biro Keuangan				
1		Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara :	Biro Keuangan			V	

	a.	Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Ganti Kerugian Negara untuk Bendahara	Biro Keuangan				
	b.	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)/Ganti Kerugian Negara untuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan/atau Pegawai Tidak Tetap (PPPK/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan/atau Pihak Ketiga	Biro Keuangan				
XVII BIRO HUKUM							
	1	Peraturan Perundang-undangan Prakarsa Kementerian Kehutanan mulai dari Rancangan Awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai dengan diundangkan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			-
	a	Peraturan Menteri Kehutanan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
	b	Peraturan Bersama	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
	c	Keputusan Menteri Kehutanan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
	d	Keputusan Bersama Menteri Kehutanan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
	e	Instruksi Menteri Kehutanan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
	f	Surat Edaran Menteri Kehutanan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			

		g	Peraturan Eselon I	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
		h	Keputusan Eselon I	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
		i	Instruksi Eselon I	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
		j	Surat Edaran Eselon I	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
		k	Peraturan Eselon II					
		l	Keputusan Eselon II					
		m	Instruksi Eselon II					
		n	Surat Edaran Eselon II					
		o	Peraturan/Keputusan Kepala UPT					
		p	Peraturan/Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran					
	2		Surat Perintah	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan			V	
		a	Surat Perintah Menteri Kehutanan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan				
		b	Surat Perintah Eselon I	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan				

	c	Surat Perintah Eselon II	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan				
	d	Surat Perintah Kepala Unit Pelaksana Teknis	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan				
	e	Surat Kuasa	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan				
3		Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis yang bersifat nasional/regional/instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir	Bagian Evaluasi dan Perizinan	V			
4		Pedoman penyelenggaraan persidangan dan rapat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
5		Nota Kesepahaman/Nota Kesepakatan/MoU/Kontrak/Perjanjian sama/Ratifikasi di dalam negeri dan luar negeri	Bagian Evaluasi dan Perizinan	V			
6		Pidana	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
7		Perdata	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
		Berkas gugatan perdata yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V		V	

	8	Tata Usaha Negara	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
	9	Berkas gugatan TUN yang sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap	Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan	V			
XVIII BIRO UMUM (KESEKRETARIATAN)							
A	Bagian Tata Usaha Pimpinan					V	
	Kearsipan					V	
	1	Sistem Kearsipan				V	
		Administrasi dalam rangka penyusunan sampai dengan penetapan sistem kearsipan					
	2	Pengelolaan Kearsipan				V	
	a.	Administrasi persuratan/Ketatalaksanaan					
		> Buku agenda/kartu kendali					
		> Lembar pengantar/buku ekspedisi					
		> Formulir/catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen/arsip					
	b.	Pengolahan, Penyimpanan, pemeliharaan, perawatan dan konservasi arsip				V	
		> Daftar arsip					
		> Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)					
		> Daftar pencarian arsip					
	3	Penyusutan arsip				V	
	a.	Pemindahan arsip inaktif					
		> Berita acara pemindahan					

		> Daftar arsip yang dipindahkan					
	b.	Pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna					
		> Berita acara pemusnahan					
		> Daftar arsip yang dimusnahkan					
		> Rekomendasi/pertimbangan/pemusnahan arsip dari instansi terkait					
		> Surat Keputusan pemusnahan					
	c.	Penyerahan arsip statis					
		> Berita acara serah terima arsip					
		> Daftar arsip yang diserahkan					
	4	Pengembangan kearsipan					
		Meliputi: pengembangan sumber daya manusia dan teknologi kearsipan				V	
	5	Layanan jasa kearsipan (peminjaman, penggunaan arsip)				V	
	6	Pembinaan kearsipan:				V	
	a.	Apresiasi/sosialisasi/penyuluhan kearsipan/lokakarya/ work shop					
	b.	Bimbingan teknis					
	c.	Supervisi dan monitoring					
	7	Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA)				V	
B	Bagian Rumah Tangga Kementerian					V	
	1	Ketertiban dan keamanan				V	
	a.	Pengamanan, penjagaan dan pengawal terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas:					
	b.	Laporan ketertiban dan keamanan					
	2	Pemeliharaan gedung dan taman				V	
	3	Pengelolaan jaringan listrik, air, telpon, televisi kabel dan komputer				V	

	4	Rekapitulasi Data Penggunaan/Langgan Peralatan Telekomunikasi				V	
	5	Administrasi penggunaan/langganan peralatan telekomunikasi				V	
	6	Rekapitulasi Data Kendaraan dinas dan bus antar jemput				V	
	7	Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dan fasilitas kantor lainnya				V	
	8	Kerumahtanggaan :				V	
	a.	Alat Tulis Kantor					
	b.	Peralatan Rumah Tangga					
	c.	Peralatan Kantor					
	d.	Kendaraan Mobilitas					
	e.	Prasarana Fisik (vital)					
	f.	Sarana Komunikasi/Informasi					
C		Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara				V	
	1	Analisa Kebutuhan				V	
	a.	Data kebutuhan BMN					
	b.	Analisa Data BMN					
	c.	Rencana Kebutuhan BMN					
	2	Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)				V	
	a.	Penghapusan, Pemindahtanganan, dan hibah BMN					
	b.	Dokumen Kepemilikan Aset/Kekayaan Kementerian LHK					
D		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa				V	
		Dokumen mulai dari perencanaan, pengadaan (HPS, spesifikasi teknis, penawaran, pengumuman pemenang, kontrak, BA pemeriksaan, BA serah terima, pembayaran, dokumen pengawasan, dst), penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan sampai dengan pelaporan				V	

E	Sub Bagian Tata Usaha					V	
	1	Administrasi Persuratan					
	2	Administrasi Penggandaan Kalender dan Buku Agenda					
	3	Administrasi Keuangan					
	4	Administrasi Barang Milik Negara					
	5	Administrasi Rencana Program dan Anggaran					
XIX	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI						
	1	Bagian Hubungan Antar Lembaga dan Protokol	Hubungan Lembaga Protokol	Antar dan			-
	1	Daftar Hubungan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara				V	
	2	Daftar hubungan Lembaga Pemerintah				V	
	3	Daftar hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah mengenai kerjasama penelitian, tenaga ahli, dll				V	
	4	Daftar hubungan dengan perguruan tinggi/sekolah mengenai magang, pendidikan sistim ganda (PSG)/praktek kerja lapangan (PKL)				V	
	5	Daftar Organisasi Kemasyarakatan/LSM				V	
	6	Laporan Forum kehumasan (Bakohumas/Perhumas)				V	
	7	Daftar Penghargaan/tanda kenang-kenangan				V	
	8	Penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar				V	
	9	Ucapan terima kasih, ucapan selamat, belasungkawa, permohonan maaf				V	
	10	Keprotokolan				V	
	a	Laporan penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)				V	-
	b	Buku Tamu				V	-
	c	Agenda kegiatan pimpinan Kementerian Kehutanan				V	-

		d	Daftar nama/alamat kantor/pejabat				V	-
		e	Hasil liputan kegiatan pimpinan Kementerian Kehutanan				V	-
2	Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik			Bagian Pelayanan dan Penyajian Informasi Publik				
	1		Laporan Penguatan Jejaring Pelayanan Informasi Publik Bidang Kehutanan				V	
	2		Laporan Kegiatan Pengelolaan Media Sosial Kementerian Kehutanan tingkat Pusat				V	
	3		Laporan Penanganan Sengketa Informasi Publik				V	
	4		Laporan Pembinaan Penyelenggaraan PPID Kementerian Kehutanan				V	
	5		Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik				V	
	6		Struktur PPID Kementerian Kehutanan		V			
	7		Daftar Informasi Publik Kementerian Kehutanan		V			
	8		Laporan Layanan Informasi Publik		V			
	6		Hubungan Media Massa dan Pendapat Umum					
	7		Siaran pers/konferensi pers/ <i>press release</i> /wawancara					
	8		Kunjungan wartawan/peliputan					
	9		Dokumentasi liputan kegiatan dinas pimpinan lingkup Kementerian Kehutanan				V	
	10		Bahan/Materi Pidato Pimpinan				V	-
3	Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional, dan Multilateral			Bagian Kerja Sama Bilateral dan Regional, dan Multilateral				
	1		Daftar Perjanjian Internasional		V			

	2	Daftar Keanggotaan Kementerian Kehutanan pada Organsasi Internasional Konvensi Internasional 15.20		V			
	3	Daftar dan Profil Proyek Kerja Sama Luar Negeri Lingkup Kementerian Kehutanan		V			
	4	Daftar Tenaga Asing pada Proyek Kerja Sama Luar Negeri lingkup Kementerian Kehutanan		V			

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Dr. Ir. Mahfudz, MP
NIP. 19670829 199203 1 004

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA
BIRO HUKUM,



Hella Winastuti Reinisia
NIP. 19810314 200501 2 025